

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan), secara umum telah berjalan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya pemahaman pihak sekolah terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Sekolah telah berupaya melaksanakan pendidikan sesuai tujuan pendidikan nasional melalui penerapan Kurikulum Merdeka, pembinaan tenaga pendidik, pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, serta penguatan karakter peserta didik. Proses pembelajaran juga telah diarahkan pada pembelajaran

yang aktif, kreatif, dan kontekstual melalui penggunaan metode diskusi, presentasi, serta pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, sekolah telah memperoleh Akreditasi A dengan skor 97 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan telah memenuhi sebagian besar standar nasional pendidikan. Akan tetapi, implementasi tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas digital, kekurangan buku paket pembelajaran, heterogenitas kemampuan siswa, serta belum meratanya kualitas pembelajaran dan perhatian guru terhadap seluruh peserta didik.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada SMAN 1 Bengkulu Selatan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* telah menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pihak sekolah telah berupaya menjalankan amanah pendidikan dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh siswa tanpa diskriminasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, membina karakter siswa, serta mengembangkan potensi peserta didik melalui Kurikulum Merdeka dan berbagai kegiatan sekolah. Prinsip keadilan juga terlihat dari adanya kesempatan belajar yang sama bagi seluruh siswa serta penggunaan pembelajaran yang lebih partisipatif

dan kontekstual. Selain itu, sekolah dan pemerintah telah berupaya mewujudkan kemaslahatan pendidikan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi. Namun demikian, implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya pemerataan perhatian guru kepada seluruh siswa, serta kondisi fasilitas umum sekolah yang masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pemenuhan fasilitas pendidikan masih perlu dilakukan agar tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah* dapat tercapai secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan melalui pemerataan kualitas pembelajaran, peningkatan kedisiplinan guru, penguatan pembinaan karakter peserta didik, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat berjalan lebih optimal.
2. Bagi pemerintah dan Dinas Pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap sekolah melalui

penambahan fasilitas pembelajaran seperti komputer, infocus, dan buku paket, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pendidikan agar mutu pendidikan semakin meningkat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan dan kajian *Siyasah Tanfidziyah*, serta dapat mengembangkan penelitian yang lebih mendalam mengenai kualitas pembelajaran dan efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Suryadi dan N. Rahmawati, "Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah Menengah di Indonesia," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 30, no. 2 (2023): 115–129.
- Abdul Karim. (2020). Implementasi pendidikan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan Publik*, 5(2), 51–64.
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996/427 H), 120–125
- Ahmad Fauzan. (2021). Peran pemerintah dalam penyediaan sarana pendidikan perspektif siyasah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 7(1), 56–70.
- Ahmad Rifai. (2020). Implementasi pendidikan demokratis dalam pengembangan potensi peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 6(1), 33–46.
- Adianto, & Mayarni. (2014). Analisis program pemberdayaan desa (PPD) melalui program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 5(1).
- Al-Mawardi, A. H. A. M. (1996). *Al-ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arafat. (2023). *Kebijakan publik (Teori dan praktik)*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Attamimi, A. H. S. (2007). *Pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan. (2022).

Kabupaten Bengkulu Selatan dalam angka 2022.
Bengkulu Selatan: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan. (2022).
Statistik daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2022.
Bengkulu Selatan: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan.

Detiknews. (2025). Pemenuhan bertahap pendidikan gratis.
Diakses 3 September 2025 dari
<https://news.detik.com/kolom/d-7953890/pemenuhan-bertahap-pendidikan-gratis>

Dwidjowijoto, R. N. (2004). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: PT Gramedia.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.

Fadlan, M. (2023). Implementasi *Siyasah Tanfidziyah* dalam tata kelola pemerintahan modern. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, 13(2), 120–139.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Huda, N. (2022). *Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Indrati, M. F. (2021). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Iriawan, H., & Ilma'nun, L. (2024). *Teori kebijakan publik*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Janpatar Simamora. (2014). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.

- La, S. (2010). *Al-sulṭah al-tasyri'iyah, al-sulṭah al-tanfidziyyah, al-sulṭah al-qada'iyah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- M. Aziz dan A. Sulaiman, “Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 45–63.
- Manan, B. (2005). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Muhaimin. (2023). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Iqbal. (2021). Konsep amanah dalam *Siyasah Tanfidziyah* terhadap kebijakan pendidikan. *Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 72–84.
- Muhammad Yusuf. (2022). Penerapan kurikulum merdeka terhadap kreativitas dan keaktifan peserta didik. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 91–103.
- Muntoha. (2022). Negara hukum Indonesia pasca amandemen UUD 1945: Perspektif konstitusional dan perlindungan hak warga negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 245–266.
- Musa Masing, & Astuti, K. (2021). Memperkuat kontribusi kesehatan mental dalam penyelesaian pandemi Covid-19: Tinjauan multidisipliner. Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.
- Nurhayati. (2021). Implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 8(2), 45–57.
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, *Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal*, Undang: *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 2 (2023).

Qardhawi, Y. (2007). *Fiqih daulah: Dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* (A. M. Al-Sabuni, Penerj.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Rina Oktaviani. (2021). Manajemen sekolah dan pembinaan tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(1), 65–78.

Rizki Ramadhan. (2022). Prinsip keadilan dalam pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 12(1), 77–89.

Satori, Djam'an, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017),h.97.

Siti Aminah. (2021). Pengaruh sarana dan prasarana pendidikan terhadap efektivitas pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(3), 122–134.

Siti Khadijah. (2022). Implementasi pendidikan dalam perspektif siyasah terhadap pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 89–102.

SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. (2026). Data guru dan tenaga kependidikan SMAN 1 Bengkulu Selatan. Dokumen Tata Usaha Sekolah.

SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. (2026). Profil sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Diakses dari <https://sman1bs.sch.id/>

SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. (2026). Struktur organisasi SMAN 1 Bengkulu Selatan. Dokumen Sekolah.

SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. (2026). Visi dan misi SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Diakses dari <https://sman1bs.sch.id/visi-misi>

Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Surabaya: PT Menuju Insan Gemilang.

Suggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),h. 184.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Cakrawati, 4(1), 1–12.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual *framework*. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widelia Nadiffa, & Saebani, B. A. (2022). Perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 1(1), 1–10.